

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS

<sup>1</sup> Erman Syarif, <sup>2</sup> Roni Ekha Putera

<sup>1,2</sup>Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Corresponding author: [ermansyarif212@gmail.com](mailto:ermansyarif212@gmail.com)

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of FMD and LSDV prevention policies by BPTUHPT Padang Mengatas, West Sumatra Province. The method used in this research is a qualitative method to see how the implementation of FMD and LSDV outbreak prevention policies. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of FMD and LSDV outbreak prevention policies at BPTU HPT Padang Mengatas was well implemented. Supported by adequate resources, facilities, and infrastructure for supporting the FMD and LSDV prevention processes. The bureaucratic structure is well implemented in formulating policies and in their implementation in the field, which is in accordance with the qualifications of employees who are experts in their fields. The communication process for providing information about standard procedures for preventing FMD and LSDV outbreaks has been carried out well in accordance with policy objectives. The attitude of policy implementers toward carrying out prevention can be accepted by leaders and also by the public who visit BPTU HPT Padang Mengatas. So that the implementation of this FMD and LSDV outbreak prevention policy has been carried out well at BPTU HPT Padang Mengatas.*

**Keywords: Attitude; Communication; Policy; Prevention of FMD and LSDV; Resources**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV oleh BPTUHPT Padang Mengatas, Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV di BPTU HPT Padang Mengatas sudah terlaksana dengan baik. Didukung oleh sumber daya yang memadai serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses pencegahan PMK dan LSDV ini. Struktur birokrasi terlaksana dengan baik dalam merumuskan kebijakan serta dalam pelaksanaan di lapangan yang telah sesuai dengan kualifikasi pegawai yang ahli dibidangnya. Proses komunikasi dalam pemberian informasi mengenai prosedur standar dalam pencegahan wabah PMK dan LSDV telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pencegahan dapat diterima oleh pimpinan dan juga masyarakat yang berkunjung ke BPTU HPT Padang Mengatas. Sehingga untuk implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV ini telah terlaksana dengan baik di BPTU HPT Padang Mengatas.

**Kata Kunci: Kebijakan; Komunikasi; Pencegahan PMK dan LSDV; Sikap; Sumber Daya**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah Grindle (1980) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Lebih lanjut, menurut argumen Grindle bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*). Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexs of policy implementation*). (Supriadin et al., 2020)

Untuk diketahui bahwa menurut Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Sektor peternakan dengan komoditi utama sapi dilaporkan sejak bulan april 2022 tengah menghadapi masalah serius akibat penyebaran penyakit kuku dan mulut (PMK) atau disebut juga *Foot Mouth Desease* (FMD). Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit menular yang menyerang hewan berkuku *artiodactyl* seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan rusa. Beberapa gejala yang ditimbulkan adalah akan muncul hipersalivasi, saliva terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Indonesia, 2022).

Beberapa regulasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi wabah PMK ini, sehingga kasus PMK setelah tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kasus yang mencapai puncak pada bulan Juni 2022. Penurunan kasus PMK ini ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Pertanian No. 311 Tahun 2023 tentang penurunan kasus PMK dari pandemi menjadi tertular pada bulan juni 2023.

Selain wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), penyakit kulit seperti benjolan (LSD) juga merupakan penyakit yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak sapi. Salam (2023) dalam artikel pada Kompas menyatakan bahwa berdasarkan data sistem informasi kesehatan nasional pada November 2022 ditemukan 11.474 kasus LSD di enam provinsi di Indonesia. Penyakit LSD banyak ditemukan pada jenis sapi perah. Hal ini dapat menurunkan produksi susu pada sapi perah yang terinfeksi LSD. Nurjanah dan Dharmayanti (2023) menyatakan bahwa *lumpy skin disease* merupakan penyakit yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan ketahanan pangan.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok dengan Visi "Menjadi Pusat Penghasil Sapi Bibit Unggul Nasional" dan Misi "Meningkatkan populasi sapi potong, meningkatkan produksi dan produktifitas bibit sapi potong, menyediakan bibit sapi potong yang bersertifikat, melakukan distribusi bibit sapi potong unggul, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha sapi potong".

Tugas pokok tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan rencana strategis BPTU HPT Padang Mengatas yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dibentuk dengan Permentan No. 56/PERMENTAN/OT.140/J-2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Struktur dan Organisasi BPTUHPT Padang Mengatas.

BPTUHPT Padang Mengatas bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas berfungsi sebagai penghasil bibit sapi Simmental, Limousin dan Pesisir, serta dinilai tinggi dalam mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan populasi dan produktivitas dalam menghasilkan bibit yang berkualitas dari sapi dan kerbau.

BPTUHPT Padang Mengatas sebagai produsen sapi eksotik ras Simmental dan Limousin yang berkualitas, secara khusus memproduksi sapi pejantan kedua ras tersebut untuk memenuhi kebutuhan Balai Inseminasi Buatan (BIB) nasional dan daerah untuk kemudian dimanfaatkan semennya untuk melakukan inseminasi buatan ternak sapi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ketersediaan benih yang berkualitas dan memenuhi standar lokal akan mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas ternak, yang pada akhirnya akan membantu memenuhi

kebutuhan daging nasional. Untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan benih unggul sebagai benih dasar, BPTUHPT Padang Mengatas terus meningkatkan produksi untuk menyediakan benih unggul baik sapi jantan maupun sapi dara yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Dengan adanya serangan wabah penyakit PMK dan LSD membuat instansi yang bergerak di bidang peternakan sapi menerima dampak yang signifikan termasuk "Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas". Salah satu instansi yang menyediakan bibit sapi unggul membuat produksi sapi pada tahun 2022 dan 2023 menjadi terganggu. Hal ini juga berdampak terhadap kebijakan yang diambil oleh BPTU HPT Padang Mengatas dalam mencegah penularan penyakit agar tidak menyebar luas dan mengatasi wabah virus PMK dan LSD yang terlanjur menjangkiti sapi-sapi yang ditenakkan di BPTUHPT Padang Mengatas.

Penurunan kasus PMK dan LSDV di Indonesia tidak terlepas dari regulasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun instansi-instansi yang bergerak di bidang peternakan. Beberapa regulasi telah disusun dalam rangka menanggulangi wabah PMK mulai dari Pemerintah Pusat sampai daerah. Salah satunya peraturan pemerintah No. 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 4 tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. Surat edaran satuan tugas penanganan penyakit mulut dan kuku No. 3 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan. Serta keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 tentang penetapan daerah wabah penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) di Provinsi Riau.

Sebelum terjadinya wabah PMK dan LSD ini, BPTU memiliki kebijakan untuk membuka akses bagi masyarakat luas untuk dapat berkunjung ke wilayah BPTU. Kunjungan ini bisa dalam rangka wisata, studi tiru, kunjungan dinas dari berbagai instansi daerah maupun pusat dan kunjungan lainnya yang bersifat resmi.

Berdasarkan temuan adanya sejumlah sapi yang telah terjangkit virus PMK dan LSD serta kerugian yang dihasilkan cukup signifikan, membuat instansi BPTU melakukan berbagai tindakan pencegahan dan penanggulangan untuk tidak mewabahnya virus tersebut menjangkiti sapi-sapi lainnya. Pengambil keputusan yaitu Kepala BPTU HPT Padang mengatas bersama para kepala sub bagian merancang berbagai kebijakan dengan sasaran kebijakan tersebut adalah seluruh pegawai beserta staf dan masyarakat yang berada disekitaran wilayah BPTU HPT Padang Mengatas serta para tamu dan wisatawan yang berkunjung ke BPTU HPT Padang Mengatas.

Diantara kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan yaitu pembatasan jumlah pengunjung yang akan memasuki kawasan BPTU HPT, penerapan *bio security* bagi

pengunjung yang akan memasuki kawasan "Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas", penyemprotan desinfektan keseluruhan lokasi BPTU dua kali dalam seminggu, peningkatan standar kebersihan bagi seluruh pejabat serta pegawai dan staf BPTU. Selain itu, BPTU juga melakukan pembinaan kepada peternak disekitar kawasan BPTU mengenai manajemen pemeliharaan ternak yang baik. Serta pemberian vitamin dan disinfektan kepada para peternak disekitaran kawasan BPTU. Sanitasi kandang juga diterapkan dalam rangka menjaga kebersihan dan mencegah adanya virus yang dapat berkembang biak.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh BPTU adalah penerapan *biosecurity* dalam mencegah masuknya wabah PMK dan LSDV. Djati et al. (2023) menjelaskan pentingnya penerapan *biosecurity* dalam mencegah penularan PMK dan LSDV.

Salah satu pencegahan dengan melarang ataupun membatasi kunjungan orang di luar karyawan atau penanggungjawab kandang. Baju khusus bekerja kandang wajib digunakan dan segera dicuci di satu kali pemakaian. Orang luar maupun kendaraan yang masuk ke kandang harus melalui dipping yang telah disediakan dan disemprot menggunakan *sprayer* yang telah disediakan. Ditingkat peternak mitra juga dilakukan hal yang sama dengan membatasi orang keluar masuk kandang dan berganti baju untuk anak kandang dengan memakai baju khusus yang hanya dipakai di kandang.

Mengingat pentingnya kebijakan yang tepat sasaran untuk internal dan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat luar dalam mengatasi penularan wabah virus PMK dan LSD dan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat mencegah dan menanggulangi wabah virus PMK dan LSD, maka peneliti mencoba untuk melakukan analisis bagaimana implementasi kebijakan yang diambil oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas dalam upaya mengatasi dan mencegah penyebaran wabah PMK dan LSD.

Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi kebijakan menurut teori Edwards III. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi target dari tujuan itu sendiri (Edwards III, 1984). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh faktor sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, komunikasi, serta disposisi atau sikap (Agustino, 2016).

## METODE

Metode penelitian merupakan elemen yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Desain penelitian dengan melakukan pendekatan secara kualitatif dimulai dari pengumpulan data hingga menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian. Menurut

Rasyid (2022), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang diberikan oleh individu atau kelompok individu terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan langkah-langkah yang muncul. Data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan partisipan, dan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti menafsirkan makna data. Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk kepada teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan pendapat Miles, Huberman & Saldaña (2014) dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. yaitu data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan wabah PMK dan LSDV oleh BPTUHPT Padang Mengatas: Perspektif Struktur Birokrasi**

BPTU HPT Padang Mengatas sebagai salah satu instansi peternakan memiliki struktur birokrasi selama ini yang sudah baik dalam proses pelaksanaan berbagai kebijakan. Dalam menerapkan suatu kebijakan, diperlukannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pembuatan prosedur kerja. SOP ini diperlukan agar kebijakan tersebut memberikan pemahaman yang sama dimulai dari pimpinan instansi serta ke pegawai-pegawai dibawahnya. SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam melakukan suatu kebijakan. Birokrasi menyediakan mekanisme untuk pengendalian dan pengawasan. Dengan struktur yang terorganisir, manajemen dapat memantau kinerja unit-unit tertentu dan membuat perubahan atau perbaikan. Koordinasi dan perintah dari atasan yang terjalin dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat berkelanjutan sehingga untuk penerapan kebijakan akan berjalan sesuai dengan aturan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Koordinasi dilakukan oleh Pimpinan BPTU HPT Padang Mengatas dalam memberikan kebijakan biosecurity ini kepada seluruh pegawai sudah berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian tujuan pelaksanaan *biosecurity* ini yang diharapkan oleh pimpinan dengan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai termasuk dilapangan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antar pegawai serta staf dalam menerapkan kebijakan *biosecurity* ini terjalin dengan baik.

---

**Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Wabah PMK dan LSDV oleh BPTUHPT Padang Mengatas: Perspektif Sumber Daya**

Dalam suatu organisasi pemerintahan maupun swasta, keberadaan sumber daya merupakan salah satu aspek utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya merupakan penggerak dalam menjalankan roda kegiatan. Sumber daya yang memadai menjadikan organisasi mencapai tujuan dengan cepat dan terarah. Sumber daya merupakan salah satu aset penting yang dimiliki organisasi. Tujuan adanya sumber daya adalah untuk sebagai aktor utama dalam membuat perencanaan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing serta menjadi roda penggerak suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Keberadaan sumber daya manusia (pegawai) pada BPTUHPT Padang Mengatas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan BPTU dalam mencapai tujuan organisasi termasuk keberhasilan dalam mencegah wabah PMK dan LSDV.

Sumber daya tidak hanya dilihat dari keberhasilan memberdayakan pegawai yang dimiliki tetapi juga harus memberikan dampak dan persepsi positif kepada masyarakat yang bersinggungan langsung dengan pelayanan instansi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga didapat gambaran bahwa untuk pelayanan yang dilakukan oleh pegawai BPTU telah memberikan respon positif serta memberikan kepuasan bagi warga yang memasuki kawasan BPTU HPT Padang Mengatas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya yang dimiliki BPTU telah termasuk kedalam kategori yang berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan visi misi instansi.

**Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Wabah PMK dan LSDV oleh BPTUHPT Padang Mengatas: Perspektif Disposisi/Sikap**

Para perumus kebijakan memiliki hak yang besar dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat. Menurut Edward III dalam Laary et al. (2022) menyatakan bahwa jika implementor atau pelaksana ingin melaksanakan suatu kebijakan maka mereka harus melaksanakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Namun apabila pelaksana kebijakan menentang atau berbeda pendapat dengan pembuat kebijakan maka penerapan kebijakan akan menjadi semakin kompleks. Suatu kebijakan dapat berlangsung secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan organisasi dari para pelaksana. Oleh karena itu, sikap yang sesuai dan saling mendukung semua komponen dalam organisasi akan menjadikan implementasi kebijakan menjadi efektif. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan BPTUHPT Padang Mengatas sangat taat dan disiplin dalam mematuhi kebijakan pencegahan PMK dan LSD ini terutama kebijakan *biosecurity*. Selain itu, kesadaran pegawai akan pentingnya kebijakan ini juga menjadi salah satu poin positif yang

---

menggambarkan tingkat kesadaran dan profesionalitas pegawai di BPTUHPT Padang Mengatas. Para pelaksana tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan menguasai kebijakan yang harus dijalankan dari pimpinan atau pembuat kebijakan tetapi mereka juga harus memiliki kesadaran dan keinginan dari dalam diri masing-masing untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Wabah PMK dan LSDV oleh BPTUHPT Padang Mengatas: Perspektif Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menerapkan suatu kebijakan. Kebijakan yang merupakan suatu pesan yang harus disampaikan kepada pegawai dan pihak yang bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan pegawai yang melaksanakan kebijakan pencegahan PMK dan LSD ini, sudah terjalin cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa proses mengkomunikasikan kebijakan pencegahan PMK dan LSD yang dilakukan kepada seluruh pegawai BPTUHPT Padang Mengatas berlangsung cukup baik. Informasi-informasi terkait pengetahuan tentang PMK disampaikan kepada seluruh pegawai dan staf di BPTU. Selain itu, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, juga disosialisasikan secara baik dan mengayomi agar masyarakat sekitar maupun tamu yang berkunjung memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menerapkan kebijakan pencegahan PMK dan LSD terutama kebijakan *biosecurity*. Dari hasil observasi peneliti di lapangan didapati bahwa sosialisasi mengenai penerapan *biosecurity* dalam memasuki kawasan BPTU ke tamu yang berkunjung terlaksana sesuai dengan SOP dan juga arahan dari pimpinan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSD di BPTUHPT Padang Mengatas, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah terlaksana dengan baik sesuai dengan model implementasi kebijakan Edward III. Struktur birokrasi yang baik, kesesuaian sikap antara pembuat kebijakan dan implementor, penyampaian informasi yang konsisten, serta penempatan sumber daya manusia yang berkualitas di posisi yang sesuai menjadikan proses implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan efisien. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam cakupan penelitian agar analisis kebijakan lebih mendalam dan terperinci.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Indonesia. (2022). Dapat diakses di: <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/video/14-kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk-pada-ternak#!>
- Djati, M. S., Kuswati, K., Susilorini, T. E., Septian, W. A., & Wahyuni, R. D. (2023). Penguatan Sistem Biosecurity Pasca Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Pada Peternakan Sapi Pedaging Di Pesantren Al Fatih Kabupaten Pamekasan. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 9(2), 62-69.
- Edwards III, G.C. (edited). (1984). *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 311 Tahun 2023 tentang Penurunan Kasus PMK dari Pandemi Menjadi Tertular.
- Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) di Provinsi Riau.
- Laary, Y., Tulus, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120).
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Nurjanah, D., & Dharmayanti, N.L.P.I. (2023, February). Ulasan Lumpy Skin Disease: Penyakit Infeksius Yang Berpotensi Mengancam Kesehatan Sapi Di Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Conference for Health Research–BRIN (ICHR 2022)*.
- Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- Permentan No. 56/PERMENTAN/OT.140/J-2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Struktur dan Organisasi BPTUHPT Padang Mengatas.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*.
- Salam, H. (2023). Wabah Lumpy Skin Disease “Kembali Muncul di Pulau Jawa”, dapat diakses di: <https://www.kompas.id>. (Diunduh pada 21 januari 2024).
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan